

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam pengelolaan limbahnya, Rumah Sakit sudah sewajibnya menerapkan akuntansi lingkungan untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Selain itu, Akuntansi lingkungan juga berfungsi sebagai kontrol atas tanggung jawab Rumah Sakit terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Namun, masih ada juga Rumah Sakit yang belum menerapkan Akuntansi Lingkungan dengan baik. Hal ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan Larasati dkk., (2020) yang menganalisis tentang Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Rumah Sakit (Studi Empiris pada Rumah Sakit di Kota Jayapura). Temuannya menyatakan bahwa Rumah Sakit Kota Jayapura belum menerapkan perlakuan akuntansi lingkungan dengan baik terhadap pengelolaan limbahnya, karena biaya lingkungan yang terkait dengan pengelolaan limbah Rumah Sakit di Kota Jayapura masih kurang mendapat perhatian yang memadai, terutama dalam hal pelatihan karyawan dan pegawai Rumah Sakit pada pengelolaan limbah. Dimana hal tersebut dapat mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap tanggung jawab Rumah Sakit pada lingkungan sekitarnya.

Pada dasarnya, masih banyak juga Rumah Sakit yang belum menerapkan akuntansi lingkungan dengan baik dan sebaliknya ada juga Rumah Sakit yang sudah menerapkan akuntansi lingkungan meskipun penerapannya masih belum sempurna. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukirman & Suciati (2019) yang menganalisis tentang Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Pada RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi lingkungan di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar belum dilakukan secara

menyeluruh dan belum secara khusus menyajikan laporan biaya lingkungan. Biaya lingkungan yang tercantum dalam laporan operasional hanya disertakan dalam biaya pemeliharaan, yang diakumulasikan bersama biaya lain pemeliharaan Rumah Sakit seperti perawatan gedung dan kendaraan. Di dalam laporan neraca, biaya lingkungan dicatat pada akun aset tetap, seperti jalan, irigasi, dan jaringan, karena beberapa dari biaya lingkungan tersebut dianggap sebagai peningkatan nilai aset. Selain itu, pada catatan atas laporan keuangan, rincian mengenai biaya lingkungan tidak dijelaskan secara mendalam. Permasalahan ini sama halnya juga pada penelitian yang dilakukan oleh Franciska dkk., (2019) yang menganalisis tentang Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan pada PT. Royal Coconut Airmadidi. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitiannya terkait penerapan akuntansi biaya lingkungan di perusahaan terutama dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan biaya lingkungan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Namun perusahaan belum menyusun laporan keuangan yang bersifat khusus atau rinci untuk biaya lingkungan.

Penerapan Akuntansi Lingkungan yang baik sangat penting bagi Rumah Sakit ataupun perusahaan, karena untuk mengetahui seberapa besar biaya lingkungan yang dikeluarkan dalam mengelola limbah tersebut dengan menggunakan sistem akuntansi sehingga dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan dan dapat mengontrol tanggung jawab Rumah Sakit ataupun perusahaan dalam menjaga lingkungan sekitarnya. Penelitian yang dilakukan oleh Liana dkk., (2021) yang menganalisis tentang Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Sebagai Salah Satu Bentuk Pertanggungjawaban Solusi (Studi Kasus Pabrik Singkong Di Dusun VI Kelurahan Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)”, menunjukkan bahwa Pabrik Singkong di Dusun VI, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur telah mematuhi ketentuan PSAK Paragraf 82 dan 94. Pengakuan atas biaya pengelolaan limbah dinyatakan dengan benar, dan pengukuran biaya

pengelolaan limbah telah sesuai dengan ketentuan PSAK Nomor 1 Paragraf 99 dan 101. Dalam pengungkapan biaya pengolahan limbah, pabrik telah mematuhi ketentuan PSAK Nomor 1 Paragraf 10. Biaya pengolahan limbah disajikan dengan jelas sebagai bagian dari biaya produksi dalam laporan laba rugi pabrik. Pabrik singkong telah menyampaikan kebijakan-kebijakan akuntansi terkait biaya pengelolaan limbah dalam laporan keuangan posisi pabrik. Sama halnya juga penelitian yang dilakukan oleh Jannah dkk., (2019) yang menganalisis tentang Penerapan Akuntansi Lingkungan di Rumah Sakit Surya Medika PKU Muhammadiyah Sumbawa”, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa di RS Surya Medika PKU Muhammadiyah sudah menerapkan akuntansi lingkungan, namun belum dikelompokkan dalam satu pos yang spesifik. Setelah dilakukan analisis, terungkap bahwa RS Surya Medika PKU Muhammadiyah Sumbawa mengalokasikan sebanyak 39,4% dari biaya operasionalnya untuk keperluan biaya lingkungan. Analisis biaya lingkungan ini bermanfaat dalam pengelolaan keuangan rumah sakit terkait aspek lingkungan, sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2019. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi nilai tambah bagi Rumah Sakit di mata masyarakat, karyawan, dan investor.

B. Landasan Teori

1. Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan merupakan perkembangan dari akuntansi sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial pada bidang ilmu akuntansi yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan akuntansi lingkungan. Dalam pengelolaan limbah, Rumah Sakit perlu menerapkan akuntansi lingkungan untuk mendukung kegiatan operasional terutama dalam pengelolaan limbah sehingga akuntansi lingkungan ini akan menjadi kontrol terhadap tanggung jawab Rumah Sakit (Islamey, 2016).

Sistem akuntansi lingkungan sebagai kontrol terhadap tanggung jawab perusahaan, karena pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan memerlukan pengukuran, penilaian, pengungkapan dan pelaporan biaya pengelolaan limbah dari hasil kegiatan operasional perusahaan. Perhitungan biaya dalam penanganan limbah tersebut diperlukan adanya perlakuan akuntansi yang tersistematis secara benar (Indrawati & Intan Saputra Rini, 2018).

Akuntansi lingkungan adalah suatu ilmu yang mengenali dan menganalisis penggunaan sumber daya, serta mengukur serta mengkomunikasikan biaya atau dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan, baik itu dalam skala perusahaan maupun dampaknya terhadap ekonomi nasional. Akuntansi sosial atau lingkungan dianggap sebagai suatu kebutuhan bagi perusahaan, bertindak sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap lingkungannya. Keberadaan akuntansi lingkungan dianggap sebagai alat yang krusial untuk memahami peran lingkungan alam dalam konteks perekonomian, dan secara tidak langsung memengaruhi kelangsungan operasional perusahaan (*going concern*) (Wijayanto dkk., 2021).

2. *Green Accounting*

a) Pengertian *Green Accounting*

Green Accounting merupakan akuntansi yang di dalamnya mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan mengungkapkan biaya-biaya terkait dengan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan. *Green accounting* merupakan jenis dari akuntansi lingkungan yang memberikan gambaran terkait upaya penggabungan manfaat lingkungan dan biaya kedalam pengambilan suatu keputusan (Bell & Lehman, 1999).

Green accounting berkaitan dengan informasi lingkungan dan sistem audit lingkungan, dan didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, melacak, menganalisis, serta melaporkan biaya yang berhubungan dengan aspek lingkungan suatu organisasi. Fungsi utama dari *green accounting* adalah menangani masalah lingkungan sosial, serta berkontribusi pada

pencapaian pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di berbagai negara, yang mempengaruhi perilaku perusahaan dalam menghadapi isu-isu tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, *green accounting* digunakan oleh perusahaan untuk membantu mencapai tujuan tanggung jawab kepada para stakeholder (Astuti, 2014).

Konsep *green accounting* sebenarnya telah mulai berkembang sejak tahun 1970-an di Eropa, dan diikuti dengan peningkatan penelitian terkait isu *green accounting* pada tahun 1980-an. Penerapan *green accounting* sangat bergantung pada karakteristik perusahaan dalam memahami isu-isu lingkungan. Pemahaman terhadap masalah lingkungan akan membimbing perusahaan dalam menentukan kebijakan, terutama yang terkait dengan keselamatan lingkungan (Astuti, 2012).

b) Peraturan Terkait *Green Accounting*

Terdapat beberapa peraturan pemerintah mengenai pengelolaan lingkungan yang mewajibkan setiap pemilik instansi, universitas, atau organisasi untuk memenuhi tanggung jawab mereka atas lahan dan lingkungan yang digunakan dalam pengoprasian (Sari dkk., 2023).

- 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang ini mengatur kewajiban setiap orang untuk berusaha melindungi, mengelola, dan memberikan informasi yang benar dan akurat tentang lingkungan hidup. Pelanggaran yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan juga dikenakan hukum.
- 2) Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang-undang ini mengatur kewajiban setiap penanam modal, yang bertindak sebagai pengusaha atau perorangan, untuk memikul tanggung jawab sosial, menjaga lingkungan, dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar. Kegagalan untuk mematuhi kewajiban ini dapat mengakibatkan peringatan tertulis,

pembatasan, penghentian sementara dan penghentian kegiatan dan/atau perjanjian investasi.

- 3) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kerusakan lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola secara sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pihak yang berkepentingan.
- 4) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 32 (Akuntansi Kehutanan) dan No. 33 (Akuntansi Pertambangan Umum) Kedua PSAK ini mengatur kewajiban perusahaan pertambangan dan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) untuk melaporkan masalah lingkungan dalam laporan keuangannya.

Berdasarkan undang-undang diatas, menimbulkan adanya kesukarelaan dari suatu instansi, universitas, atau organisasi dalam mengelola dan melestarikan lingkungan dengan adanya kepedulian.

3. Biaya Lingkungan

a. Pengertian Biaya Lingkungan

Biaya lingkungan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena adanya sistem pengelolaan lingkungan yang buruk akibat dari proses produksi perusahaan (Camila, 2016) Sedangkan menurut Fitriani., (2013) biaya lingkungan dihitung dengan membandingkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR dengan laba bersih, sehingga dalam penelitian ini biaya lingkungan dihitung dengan membandingkan dana progam bina lingkungan sebagai bagian dari CSRnya BUMN dengan laba bersih.

Penerapan biaya lingkungan merupakan mekanisme bagi rumah sakit guna mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke

dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang lingkungan maupun jika terjadi tuntutan hukum akibat dampak lingkungan (Haryani dkk., 2020). Biaya lingkungan tidak hanya mengenai informasi tentang biaya-biaya lingkungan dan informasi lainnya yang terukur, akan tetapi juga tentang informasi material dan energi yang digunakan (Haryani dkk., 2020).

Biaya lingkungan dapat dibagi menjadi empat kategori yaitu (Amaliya & Burhany, 2022):

1. Biaya pencegahan lingkungan (*environmental prevention costs*), meliputi biaya aktivitas yang berkaitan dengan pencegahan produksi kontaminan dan atau limbah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.
2. Biaya deteksi lingkungan (*environmental detection costs*), meliputi biaya aktivitas untuk menentukan kesesuaian antara produk, proses, dan aktivitas lain di dalam perusahaan dengan standar lingkungan yang sesuai.
3. Biaya kegagalan internal lingkungan (*environmental internal costs*), meliputi biaya aktivitas untuk menghilangkan dan mengelola kontaminan atau limbah yang telah dihasilkan perusahaan akibat kegiatan operasionalnya sebelum di buang ke lingkungan.
4. Biaya kegagalan eksternal lingkungan (*environmental external failure costs*), meliputi biaya aktivitas setelah kontaminan dan limbah dibuang ke lingkungan.

b. Tahapan-Tahapan Alokasi Biaya Lingkungan

Biaya pengelolaan lingkungan adalah biaya yang muncul dari upaya mengurangi dan mengendalikan dampak negatif aktivitas perusahaan, serta biaya rutin lainnya . Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tahun 2012 No. 32 dan 33 mengatur kewajiban perusahaan untuk melaporkan item-item lingkungan dalam laporan keuangan mereka.

Pengelompokan dalam tahap analisis lingkungan sebagaimana yang ditentukan oleh standar akuntansi keuangan (PSAK, 2015) antara lain sebagai berikut, (Humaidi, 2023):

1) Identifikasi

Pada tahap awal, perusahaan akan menentukan biaya untuk pengelolaan dan penanggulangan eksternalitas yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasionalnya dengan mengidentifikasi dampak negatif tersebut. Sebagai contoh, sebuah rumah sakit yang diperkirakan akan menghasilkan limbah berbahaya perlu mengidentifikasi jenis limbah yang mungkin timbul dan memerlukan penanganan khusus.

2) Pengakuan

Setelah dampak negatif diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengakui biaya tersebut sebagai akun atau rekening biaya pada saat penerimaan manfaat dari sejumlah nilai yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan lingkungan. Biaya yang digunakan oleh perusahaan setiap bulan untuk mengelola limbah diambil dari biaya yang sudah dicadangkan (dianggarkan) melalui pembiayaan yang dibayar di muka.

3) Pengukuran

Pengukuran adalah proses menentukan angka atau satuan pengukur terhadap suatu objek untuk menunjukkan makna tertentu dari objek tersebut. Umumnya, perusahaan mengukur biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan menggunakan satuan moneter yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan jumlah yang benar-benar dikeluarkan. Jumlah dan nilai yang tepat diperoleh sesuai kebutuhan riil perusahaan setiap periode.

4) Penyajian

Penyajian adalah proses melaporkan elemen atau pos dalam laporan keuangan agar elemen atau pos tersebut menjadi lebih

informatif. Biaya lingkungan dapat disajikan dalam laporan keuangan dengan nama rekening yang berbeda-beda, karena tidak ada ketentuan baku untuk rekening yang mencakup alokasi pembiayaan lingkungan perusahaan tersebut.

5) Pengungkapan

Pengungkapan adalah cara menyajikan atau menjelaskan informasi penting dan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Menurut standar akuntansi, informasi atau objek harus disajikan secara terpisah dalam laporan utama, dengan rincian pos atau cukup disajikan dalam bentuk catatan kaki (footnote).

4. **Limbah Rumah Sakit.**

Menurut Mulansari, (2011) sampah dan limbah Rumah Sakit merupakan semua sampah dan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan Rumah Sakit dan kegiatan penunjang lainnya. Secara umum limbah Rumah Sakit dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu limbah klinis dan non klinis, baik padat maupun cair.

Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan Rumah Sakit dalam bentuk padat, cair, pasta (gel) maupun gas yang dapat mengandung mikroorganisme patogen bersifat infeksius, bahan kimia beracun, dan sebagian bersifat radioaktif (Depkes, 2006). Limbah rumah sakit cenderung bersifat infeksius dan kimia beracun yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, memperburuk kelestarian lingkungan hidup apabila tidak dikelola dengan baik (<https://web.rshs.or.id/limbah-rumah-sakit>).